



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 3 Agustus 2022



Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 3 Agustus 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allat SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 telah selesai disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program – program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indicator kinerja dan pencapaian kinerja.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2023 diharapkan dapat direalisasikan sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Target yang di tetapkan pada perubahan RENSTRA 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, Agustus 2022
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat

EDY MURDANI,SH

Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19670822 198893 1 004

DAFTAR ISI

COVER

SK PENETEPAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA OPD	28
3.3 Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	46
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 T.C.29	10
Tabel 2.2 T.C.30	17
Tabel 2.4 T.C.31	22
Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran Renja	28
Tabel 3.3 T.C.3.3	30
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan pendanaan perangkat Daerah	47

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Diskominfo sesuai tugas dan fungsi lembaga, memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.

Selanjutnya, Renja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 L.D Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 No.7
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Diskominfo serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
8. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
9. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
10. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
11. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.
12. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*, Berisikan uraian mengenai :
 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat Daerah dan hal yang terkait dengan perangkat Daerah: Khusus Provinsi, Uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program perangkat daerah kabupaten serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam pencapaian kinerja pembangunan;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional/ internasional, seperti: NSPK, SPM.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana kerja diskominfo kab.Pasbar merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2023 sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD tahun 2023 yang di tindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam rangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk mengakomodir pelaksanaan tugas/urusan wajib tersebut Kabupaten Pasaman Barat melaksanakannya dengan penetapan Dinas Daerah yang melaksanakan tugas bidang Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian yang mulai secara teknis pada tanggal 1 Januari 2017. Sebelumnya sampai akhir Desember 2016 sebelumnya urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Informatika yang bergabung dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Diskominfo tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengoptimalisasinya pengaplisasian program – program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pada Kominfo sendiri, dimana program program tersebut menunjang

keberhasilan atau kemajuan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Komunikasi, informatika dan bidang persandian.

- b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, karena kurangnya anggaran yang dibutuhkan pada bidang – bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Terdapat beberapa Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2022) disajikan pada tabel 2.1 berikut :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022 KABUPATEN PASAMAN BARAT

KODE	1	2	3	4	5	Tertarget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
						Tertarget RENJA Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16										
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	% terpublikasinya informasi pembangunan daerah pada PPIID	100%	80%	80%	80%	100%	80%	100%	100%

2	16	2	02.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	100%	100%	100%	75%	100%	75%	75%
2	16	2	02.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah peraturan Bupati tentang website Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
2	16	2	02.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah monitoring opini dan aspirasi publik	12 kali	7 kali	7 kali	100%	7 kali	100%	100%
2	16	2	02.01	3	Monitoring Informasi dan Pencapaian Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Monitoring Informasi dan Pencapaian Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12 kali	7 kali	7 kali	100%	12 kali	100%	100%
2	16	2	02.01	4	Pengelolaan Konten dan Pencapaian Media Komunikasi Publik	Jumlah berita yang terpublikasi di media	365 Berita	264 Berita	264 Berita	100%	264 Berita	100%	100%
2	16	2	02.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	100%
2	16	2	02.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis kerjasama layanan media masa	21 jenis	17 jenis	17 jenis	100%	17 jenis	100%	100%
2	16	2	02.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta sosialisasi PPID	100 peserta	-	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100%	100%
2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah peserta sosialisasi	200 peserta	-	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100%	100%

2	16	2	02.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah kegiatan Penilaian komisi informasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	100%	
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan	20 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	100%	10 kelompok	100%	100%	
2	16	2	02.01		Pengelola Media Komunikasi Publik/Pasbar	Jumlah diseminasi informasi Penda melalui media cetak dan elektronik	1 Kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	-	-	
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo "	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	16	3	02.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan internet yang di pelihara	112 titik	70 titik	74 titik	74 titik	100%	80 titik	71%	71%
2	16	3	02.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jaringan informasi yang terhubung	43 instansi	31 OPD, 11 kecamatan, 20 puskesmas	31 OPD, 11 kecamatan, 14 puskesmas	31 OPD, 11 kecamatan, 14 puskesmas	100%	31 OPD, 11 kecamatan, 12 puskesmas	100%	100%
2	16	3	02.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	8 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	100%	5 aplikasi	100%	100%

2	16	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelola pusat data	8 orang	-	3 orang	2 orang	66%	5 orang	66%	66%
2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	8 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	100%	5 aplikasi	100%	100%
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI								
2	21	2			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks KAMI	3 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	100%	1 indeks	100%	100%
2	21	2	02.01		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan aplikasi Umum Berbagi pakai	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	21	2	02.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem keamanan informasi yang dapat yang dapat di tanggulang/ di pulihkan	6 sistem	2 Sistem	2 sistem	2 sistem	100%	3 Sistem	100%	100%
2	21	2	02.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem elektronik yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik	2 aplikasi	1 aplikasi	2 aplikasi	1 aplikasi	50%	1 aplikasi	50%	50%
2	21	2	02.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterselenggaraan perangkat daerah dalam jaringan komunikasi sandi	99%	100%	80%	100%	100%	80%	100%	100%

2	21	2	02.02	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Samsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah SDM yang melakukan BIMTEK jaringan komunikasi samsi yang dilaksanakan oleh BSSN	3 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	100%	100%
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	OPD yang menggunakan Data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	100%	-	-	-	-	85%	-	-
2	20	2			PROGRAM PENGELOMPOKAN STATISTIK SEKTORAL	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	-	-	-	-	85 %	-	-
2	20	2	02.01		Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot	Presentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	32 OPD	-	-	-	-	32 OPD	-	-
2	20	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah rapat koordinasi Statistik Sektoral	7 Kali	-	-	-	-	4 Kali	-	-
2	20	2	02.01		Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	133 SDM Pengelola Data	-	-	-	-	133 SDM Pengelola Data	-	-
2	20	2	02.01		Membangun metadata statistik Sektoral	Penyusunan Metadata Kegiatan Statistik Sektora	133 buku	-	-	-	-	133 buku	-	-

2 20 02	20	2	02.01	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Walidata Sektoral: Produsen Data Sektoral dan Negeri Statistik	133 Negeri	-	-	-	-	133 Negeri	-	-
---------------	----	---	-------	--	--	------------	---	---	---	---	------------	---	---

Simpang Empat, Agustus 2022
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

 Edy Mardani, SH
 NIP. 19670822 198803 1 004

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat dalam mendukung pencapaian Misi Ke-5 dan Misi Ke-6 Pembangunan Daerah periode 2021-2026, Dibawah ini disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format table T-C 30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat

No	Indikator Sarasan/IKU Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analis
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	1. Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	-	B	B	
	2. Persentase Penurunan temuan pemeriksaan	10	8	8	6	5	-	8	6	
	3. Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	1,98	3,370	2,35	2,48	
	Indeks Maturitas SPBE	3	3	3	4	1,98	-	3	4	
	1. persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	100	100	100	

2. % Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	5	10	10	25	5	6	10	25	
Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	100	100	100	100	75	90	100	100	
OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	80	85	90	95	85	90	90	95	Sebagian besar OPD (90%) menggunakan data statistik dari BPS dalam menyusun perencanaan kegiatan-kegiatannya

Indek KAMI	1	1	2	2	0	1	2	2	Penilaian maniri indek kami dilaksanakan pada tahun 2022 dengan nilai 1 (100%)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,5	85	85,6	70,1	80	85	85,6

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk menacapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin di capai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- a. Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi pengembangan kelembagaan maupun sumberdaya melalui diklat teknis dan penjenjangan serta pendekatan yang terukur dan sitimatis terhadap OPD yang terkait.
- b. Fasilitas Komunikasi dan Informatika belum dapat menjangkau daerah kabupaten Pasaman barat, baik ditempat-tempat strategis terutama di Jorong/nagari terpencil.
- c. Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang komunikasi dan informatika belum mencukupi.
- d. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang komunikasi belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.
- e. Kurangnya sarana mobilitas aparat Dinas Komunikasi dan informatika.
- f. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan kegiatan di

Bidang Komunikasi dan Informatika.

- g. Masih terbatasnya sarana penunjang untuk mengerakkan kegiatan komunikasi dan informatika seperti penerangan keliling, pemutaran film, dan sosialisasi kebijakan pemda serta penyiaran radio.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi ,
- b. Peningkatan peranan pos dan telekomunikasi serta media massa melalui pemberdayaan sehingga terjalinnya kerjasama dan keterpaduan langkah dalam penyediaan informasi,
- c. Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan,
- d. Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-government).

Diharapkan melalui strategi-strategi tersebut diatas Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dapat mencapai tujuan Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2021-2026.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2022, jumlah Plafon Belanja Langsung Sementara yang dialokasikan untuk Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. **7.672.238.072,-** (Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu tujuh puluh Dua Rupiah). Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel T-31
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pasaaman Barat
Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan tahun 2023					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator		
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.722.123,452	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.108.565.771		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Terpenbihnya belanja pegawai ASN dan non ASN	12 Bulan	2.718.592,982	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenbihnya belanja Pegawai ASN dan non ASN	12 Bulan	2,982,325,284		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/Diklat	20 org	25,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/Diklat	20 org	100,000,000		
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	787,476,300	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	100,000,000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	104,899,170	Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	105,598,161		

					Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	20 Unit	86.155.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	21 Unit	124.028.333
					Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya biaya rekening belanja pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	2.000.000	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	- Terpenuhinya kebutuhan informasi pembangunan Informasi publik -Kerjasama dengan media barian, mngguan dan online - Mendorong KIM berkembang mandiri sebagai wahana Informasi di masyarakat	100%	1,247,400,790	Program Informasi dan Komunikasi Publik	- Terpenuhinya kebutuhan informasi pembangunan Informasi publik -Kerjasama dengan media barian, mngguan dan online - Mendorong KIM berkembang mandiri sebagai wahana Informasi di masyarakat	100%	1,265,563,267	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskominfo	Persentase terpublikasinya Berita Pemerintah Daerah	2.064 Berita	1,247,400,790	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpublikasinya Berita Pemerintah Daerah	2.114 Berita	1,265,563,267

3	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo	Levelling SPBE	Level 3	2,206,227,080	Program Aplikasi Informatika	Levelling SPBE	Level 3	2,239,320,486
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah Website dan sub Domain yang terkelola dan jumlah kantor yang terhubung jaringan intranet dan Internet	61 Titik	1,800,000,000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Website dan sub Domain yang terkelola dan jumlah kantor yang terhubung jaringan intranet dan Internet	71 Titik	1,827,000,000
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah Aplikasi yang di Kelola dan di Kembangkan	3 Aplikasi	406,227,080	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Aplikasi yang di Kelola dan di Kembangkan	3 Aplikasi	412,320,486
4	Program Penyelenggaraan dan statistik	Diskominfo	Persentase OPD yang menggunakan	75 %	390,343,000	Program Penyelenggaraan dan statistik	Persentase OPD yang menggunakan		396,198,145
	Penyelenggaraan statistik dan sektoral	Diskominfo	Persentase OPD yang menggunakan	25 OPD	390,343,000	Penyelenggaraan statistik dan sektoral	Persentase OPD yang menggunakan		396,198,145

5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo	Pengoperasian Pusat Data	2 Kali Diklat Sendiman	106,143,750	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pengoperasian Pusat Data	3 Kali Diklat Sendiman	107,735,906	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskominfo	Persentase Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	100%	67,711,750	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	100%	68,727,426	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	pasbar	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	80 %	38,432,000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	80 %	39,008,480	
	Jumlah			7,672,238,072				8,117,383,575		

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp. 8.117.383.575,-** (Delapan Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh lima Rupiah) dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Diskominfo dan RPJMD Periode 2021-2026.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Garut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DISKOMINFO yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra DISKOMINFO, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari setiap misi ditetapkan tujuan dan sasaran Renja DISKOMINFO Tahun 2023.

Adapun tujuan dan sasaran dari ke-5 (lima) misi DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan Pembangunan yang Mengacu pada Misi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan
1	Mengembangkan kemampuan sumberdaya untuk melaksanakan tugas secara profesional dalam bidang komunikasi dan informatika	Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional
2	Menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah	Mewujudkan fasilitas komunikasi yang berkualitas
3	meningkatkan kapasitas layanan informasi dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi	Mewujudkan masyarakat berbudaya informasi
4	Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperoleh aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi	Meningkatkan komunikasi dan informatika semakin baik
5	Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambahan layanan informasi	Meningkatkan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

3.3 Program dan Kegiatan

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam (Lima) program yang terdiri dari 12 (Dua Belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tahun 2023

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023					Prkiraan Meja Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an				Hasil Kegiat an	Target		Target
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2 1 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
2 1 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2 1 0 2 1	Penyedi aan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayana n penunjan g urusan pemerint ahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	level maturias SIPP	Semua Kab/Kot a, Semua Kecema tan, Semua Kelurah an	100 %	0 Orang /bula 21 orang	2.11 indek s	2.423,348,38 3	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayana n penunjan g urusan pemerinta han daerah	100 %	2.442,771,674	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2102.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Level maturitas SPIP	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang, Aua	100 %	0 Paket	2.11 indeks	2,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
2102.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Level maturitas SPIP	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang, Aua	100 %	0 Laporan	2.11 indeks	150,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	150,000,000
2102.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								142,067,119				142,067,119
2102.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas untuk operasional kantor	Level maturitas SPIP	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	2.11 indeks	35,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	35,000,000

210206108	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Level Maturitas SIPP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 100 bulan	2.11 indeks	2,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,000,000
-----------	---	--	--	----------------------	--	-------	---------------------	-------------	-----------	---------------------------------------	--	-------	-----------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023						Prkiraan Maja Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2102.06109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															123,700,000	123,700,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas-Jabatan	Cakupan pelayana penunjan g urusan pemerinta han daerah	Jumlah kendaraan Dinas yang pemeliharaan dan pembayaran pajak/ KI	Level maturitas spip	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	100 %	8 Unit 0 Unit	2.11 indeks	4,700,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum		Cakupan pelayaran penunjan g urusan pemerinta han daerah	100 %	4,700,000			
2102.06102	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Cakupan pelayana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Level maturitas spip	Semua Kab/Kot a, Semua	100 %	0 Unit 8 Unit	2.11 indeks	70,000,000	Dana Transf er		Cakupan pelayaran penunjan	100 %	70,000,000			

9	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penunjukan urusan pemerintahan daerah	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan Dinas operasional yang mendapat pemeliharaan dan pembayaran pajak / KIR		Kecamatan, Semua Kelurahan						Umun -Dana Alokasi Umum		Umun pemerintahan daerah		
2102.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara	Level maturitas sip	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	43 unit	2.11 indeks	20,000,000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20,000,000
2102.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang di pelihara	Level maturitas sip	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Pasaman Barat, Pasaman,	100 %	1 unit	2.11 indeks	28,000,000		Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	28,000,000

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
2102.01	Perumusan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	% publikasi informasi pembang unan daerah pada PPID	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	persentase publik yang di selenggarakan n secara online dan terintegrasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluas an informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kab/kota	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	85 %	0 Doku men 2 dok	100 Persen	23,870,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% publika si informa si pemba nguran daerah pada PPID	85 %	23,870,000
2102.03	Monitoring Informasi dan Partisipan	% publikasi	Jumlah monitoring informasi	persentase publik yang di selenggarakan n secara online dan	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan	85 %	12 kali	100 Persen	8,212,500	Dana Transfer	% publika si	85 %	8,212,500

1	Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintahan Daerah	informasi pembangunan daerah pada PPID	dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintahan daerah	terintegrasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan daerah kab/kota	n, Semua Kelurahan					Umum-Dana Alokasi Umum	informasi pembangunan daerah pada PPID		
2106201	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	jumlah berita yang terpublikasi di media	persentase publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan daerah kab/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	264 berita	100 Persen	243,482,145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	85 %	243,482,145

2102.06	Pelayanan Informasi Publik	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik pelayanan informasi publik	persentase publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi masyarakat yang menjadi sasaran penyesuaian informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas daerah kab/kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	85 %	0 Dokumen Kegiatan	100 Persen	13,794,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	85 %	13,794,500
2102.07	Layanan Hubungan Media	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	Jumlah jenis kerjasama layanan media massa	persentase publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi masyarakat yang menjadi sasaran penyesuaian informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	85 %	25 jenis	100 Persen	658,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	85 %	658,520,000

[illegible][illegible]

2106302	2.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo "	Jumlah Aplikasi yang Di kembangkan	indeks kepuasan masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 aplikasi	85 indeks	170,000,000	Dana Transfer Umum	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo "	100 %	170,000,000
2200		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
22002		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL												
2200202	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
220020201		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan dan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral jumlah rapat koordinasi statistik	OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Dokumen 7 kali	90 persen	86,362,037	Dana Transfer Umum	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan dan Daerah	90 %	86,362,037

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2202020201	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Semua Kab/Kot	90 %	133 SDM pengelolan Data Orang	90 persen	86,362,036	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %	86,362,036
2202020301	Membangun Metadata Statistik Sektoral	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Semua Kab/Kot	90 %	0 Dokumen 133 buku	90 persen	86,362,036	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %	86,362,036

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2023 yang ditindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan kebijakan umum APBD. Prioritas dan Plafon anggaran sementara APBD Tahun 2023 masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip – prinsip safe guarding yaitu transparansi , akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program – program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya kegiatan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan program kegiatan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program kegiatan tahap berikutnya. Rencana kerja dan pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Dipindai dengan CamScanner

2102.0	Penyediaan Administrasi	Cakupan pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	level maturitas SIPP	Semua Kab/Kot a, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 12 orang	2.11 indeks	174,850,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	174,850,000
6102	Pelaksanaan Tugas ASN	penunjang urusan pemerintah an daerah	Tugas ASN PNS (PTT dan THL) penunjang administrasi perkantoran										
2102.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah an daerah	jumlah pejabat pengelola keuangan yang menerima honorarium	level maturitas SIPP	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 orang	2.11 indeks	100,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100,000,000
6102.0													
2102.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
6102.0									29,350,000				34,350,000
2102.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah an daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pengadaan pakaian Dinas	level maturitas SIPP	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	0 Paket 52 orang	2.11 indeks	21,350,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	21,350,000
6102.0													

2102.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek/Diklat Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	level maturitas spip	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	20 orang	2.11 indeks	8,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	13,000,000
2102.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah									247,000,000			252,000,000
2102.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Level maturitas SPIP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket	2.11 indeks	5,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,000,000

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023					Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2102.06	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjan g urusan pemerinta han daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Level maturitas SIPP	Kab. Pasam an Barat, Pasam an, Lingku ang Aua	100 %	0 Paket 1 Paket	2.11 indeks	90,000,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum		Cakupan pelayanan penunjan g urusan pemerinta han daerah	100 %	90,000,000
2102.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayana n penunjan g urusan pemerinta han daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	Level maturitas SIPP	Kab. Pasam an Barat, Pasam an, Lingku ang Aua	100 %	0 Paket 1 paket	2.11 indeks	2,000,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum		Cakupan pelayanan penunjan g urusan pemerinta han daerah	100 %	2,000,000

2102.06109	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Level maturitas SPIP	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang, Aua	100 %	0 Laporan 122 kali	2.11 indeks	150,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	150,000,000
2102.06107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								142,067,119				142,067,119
2102.06101	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk operasional kantor	Level maturitas SPIP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit 0 Unit	2.11 indeks	35,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	35,000,000
2102.06107	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi	Level maturitas SPIP	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang	100 %	4 Unit 0 Unit	2.11 indeks	106,067,119	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100 %	106,067,119

		Daerah	perkantoran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	ng Aun					Umum	daerah			
2102.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayana n penunjan g urusan pemerinta han daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	100 %	0 Unit	2.11 indeks	1,000,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Cakupan pelayanan penunjan g urusan pemerinta han daerah	100 %	1,000,000	
2102.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,000,000					2,000,000
2102.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayana n penunjan g urusan pemerinta han daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhnya biaya rekening belanja pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	100 %	0 Lapora n 100 bulan	2.11 indeks	2,000,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Cakupan pelayanan penunjan g urusan pemerinta han daerah	100 %	2,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prestasi Kerja				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Pendana &	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
2102.06109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123,700,000				123,700,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan Dinas yang pemeliharaan dan pembayaran pajak/ KI Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Level maturitas sipip	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	2.11 indeks	4,700,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4,700,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan Dinas yang pemeliharaan dan dibayarkan Pajaknya	Level maturitas sipip	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	2.11 indeks	70,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	70,000,000

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023					Prakiraan Biaya Anggaran Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2106201	Perumusan Keputusan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	% publikasi informasi pembang unan daerah pada PPID	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Keputusan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	persentase publik yang di selenggarakan n secara online dan terintegrasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluas an informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kab/kota	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan n	85 %	0 Dokumen 2 dok	100 Persen	23,870,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	85 %	23,870,000	
2106202	Monitoring, Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	% publikasi informasi pembang unan daerah pada	Jumlah monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi	persentase publik yang di selenggarakan n secara online dan terintegrasi masyarakat yang menjadi sasaran	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan n	85 %	12 kali	100 Persen	8,212,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	% publikasi informasi pembangunan daerah	85 %	8,212,500	

2102.06	Pelayanan Informasi Publik	% publikasi informasi pembang unan daerah PPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik pelayanan informasi publik	persentase publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kab/kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Dokumen Kegiatan	100 Persen	13,794,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	% publikasi informasi pembang unan daerah PPD	85 %	13,794,500
2102.07	Layanan Hubungan Media	% publikasi informasi pembang unan daerah PPD	Jumlah jenis kerjasama layanan media massa	persentase publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kab/kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 jenis	100 Persen	658,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	% publikasi informasi pembang unan daerah PPD	85 %	658,520,000

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Pendanaan	Catatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2102.1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	% publikasi informasi pembanguan daerah pada PPID	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Program atau Kebijakan Jumlah KIM yang di kembangkan dan di berdayakan	persentase publik yang di selenggarakan secara online dan terintegritas masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kab/kota	Kab. Pasa man Barat	85 %	0 Dokumen	100 Persen	95,020,000	Dana Transfer Umum m-Dana Alokasi Umum		% publikasi informasi pembanguan daerah pada PPID	85 %	95,020,000
2106.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
2102.6301	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1,640,281,960					1,640,281,960

2106301	2.03	Penyenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo "	jaringan informasi yang terhubung	indeks kepuasan masyarakat	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	100 %	112 titik	85 indeks	1,640,281,960	Dana Transfer Umum m-Dana Aloka Transfer Umum	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo "	100 %	1,640,281,960
2106302	2.03	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
2106302	2.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo "	Jumlah pengelolan Pusat Data	indeks kepuasan masyarakat	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	100 %	5 orang	85 indeks	130,000,000	Dana Transfer Umum m-Dana Aloka Transfer Umum	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo "	100 %	13,000,000
2106302	2.03	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung	Jumlah Aplikasi yang Di kembangkan	indeks kepuasan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan	100 %	5 aplikasi	85 indeks	170,000,000	Dana Transfer Umum	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung	100 %	170,000,000

2202.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektor dari BPS Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Walidata Sektor, Prodi Data Sektor, dan Nagari Statistik	OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Orang 133 Nagari	90 persen	86,362,036	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %	86,362,036
2202.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								111,450,938				111,450,938
2202.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								111,450,938				111,450,938
2202.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah								85,725,469				85,725,469
2202.01	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks KAMI	Jumlah sistem keamanan informasi yang fapat di tanggulang/ di pulihkan	Indeks KAMI	Semua Kab/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Indeks	6 sistem	2 nilai	42,862,734	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Indeks KAMI	2 Indeks	42,862,734

2202.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pelanggaran Elektronik yang telah di manfaat kan sertifikat elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Indeks	0 Laporan 2 aplikasi	2 nilai	42,862,735	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Indeks KAMI	2 Indeks	42,862,735
2202.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi Jumlah SDM yang melakukan BIMTEK jaringan komunikasi sandi yang dilaksanakan oleh BSSN	Indeks KAMI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Indeks	0 Peran gkat Daerah 3 orang	2 Nilai	25,725,469	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Indeks KAMI	2 Indeks	25,725,469
2202.01	Operation alisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi Jumlah SDM yang melakukan BIMTEK jaringan komunikasi sandi yang dilaksanakan oleh BSSN	Indeks KAMI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Indeks	0 Peran gkat Daerah 3 orang	2 Nilai	25,725,469	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Indeks KAMI	2 Indeks	25,725,469
TOTAL								6,682,395,690				6,594,818,981

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab memberikan keyakinan yang memadai.

Atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, perlu merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Pasaman Barat, 03 Agustus 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat



Edy Murdani, SH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670822 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Sockarno Hatta No.29 Telp. (0753) 466262 fax. (0753) 466170-

Simpang Empat 26515

Website : WWW.kominfo.pasamanbaratkab.go.id

email : dinas@kominfo.pasamanbaratkab.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR :188.4 /SK/DISKOMINFO/I/2022

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka menengah daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD memuat program dan kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
21. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No.2 tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : (1) Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2023;
(2) Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA DISKOMINFO
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Edy Murdani, SH
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 19670822 198803 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 188.4 / 586 /Diskominfo/2022

Tanggal : 13 Agustus 2022

Tentang : Tim penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Edy Murdani,SH	Ketua	Kepala Dinas
Bendri, S.Kom	Sekretaris	Sekretaris Dinas
Kelompok Kerja bidang perencanaan dan Evaluasi Pembangunan		
Endang Susanti, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Zakirman,SH	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
Arnoli	Sopir	Anggota
Kelompok kerja Bidang E-goverment dan Aplikasi		
Sunarto, S.Pd	Kabid Layanan E-Government, dan APTIKA	Anggota
Rahmad Junico Hamzah, A.Md	Teknisi Jaringan Instalasi	Anggota
Fera Ferdian, S.Kom	Perancang Grafis	Anggota
Algib, A.Md	Pengelola Situs Atau Web	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Komunikasi dan informasi Publik		
Yudhinal Reviola, SE	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
Oktavianta	Kasi Kemitraan Informasi Publik	Anggota
Ns. Mitra Vemilda,M.Kep	Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
Santi Prestika Dora,S.ST	Analisis konten Media Sosial	Anggota
Tiara Oktaviani, A.Md.T	Operator Komunikasi	Anggota

Nazia Elvina, S.I.Kom	Analisis Berita	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Statistik dan Persandian		
Amiri, SH	Kabid Statistik dan Persandian	Anggota
Siti Oloan Hasibuan, SE	Kasi Keamanan Informasi	Anggota
Retno Astuti, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
Zaki Minango Dasman, S.Kom	Analisis Tata Kelola Keamanan Siber	Anggota
Yesi Putri Hanifah, A.Md	Operator Sandi dan Telekomunikasi	Anggota

**KEPALA DISKOMINFO
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Edy Murdani, SH
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 19670822 198803 1 004**